



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

Laporan Kinerja Tahun 2021

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Ahmad Yani Tlp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062 Kode Pos 78124
PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 selesai disusun sesuai ketentuan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Perangkat Daerah (PD) kepada Gubernur mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang secara berkala setiap tahun disusun laporannya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 31 Januari 2022

KEPALA BIRO ORGANISASI,



RITA HASTARITA, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19791208 200003 2 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	16
6. Sarana dan Prasarana	17
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Perencanaan Strategis (Renstra) 2018-2023	30
1. Visi	30
2. Misi	30
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
B. Perjanjian Kinerja (Perjankin) Tahun 2021	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi	34
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	61
LAMPIRAN:	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021.	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Biro Organisasi merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana tugas Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdiri atas 3 Bagian dan 9 Sub Bagian:

- 1) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 - Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - Sub Bagian Analisis Jabatan
- 2) Bagian Tatalaksana, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
 - Sub Bagian Pelayanan Publik
 - Sub Bagian Tata Usaha Biro
- 3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - Sub Bagian Reformasi Birokrasi
 - Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - Sub Bagian Budaya Kerja

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1) Kepala Biro

Dipimpin oleh seorang Kepala Biro (Pejabat Struktural Eselon II.b).

2) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

b) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

c) Sub Bagian Analisis Jabatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

3) Bagian Tatalaksana

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tatalaksana (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Tatalaksana membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

b) Sub Bagian Pelayanan Publik

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

c) Sub Bagian Tata Usaha Biro

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

4) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

b) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

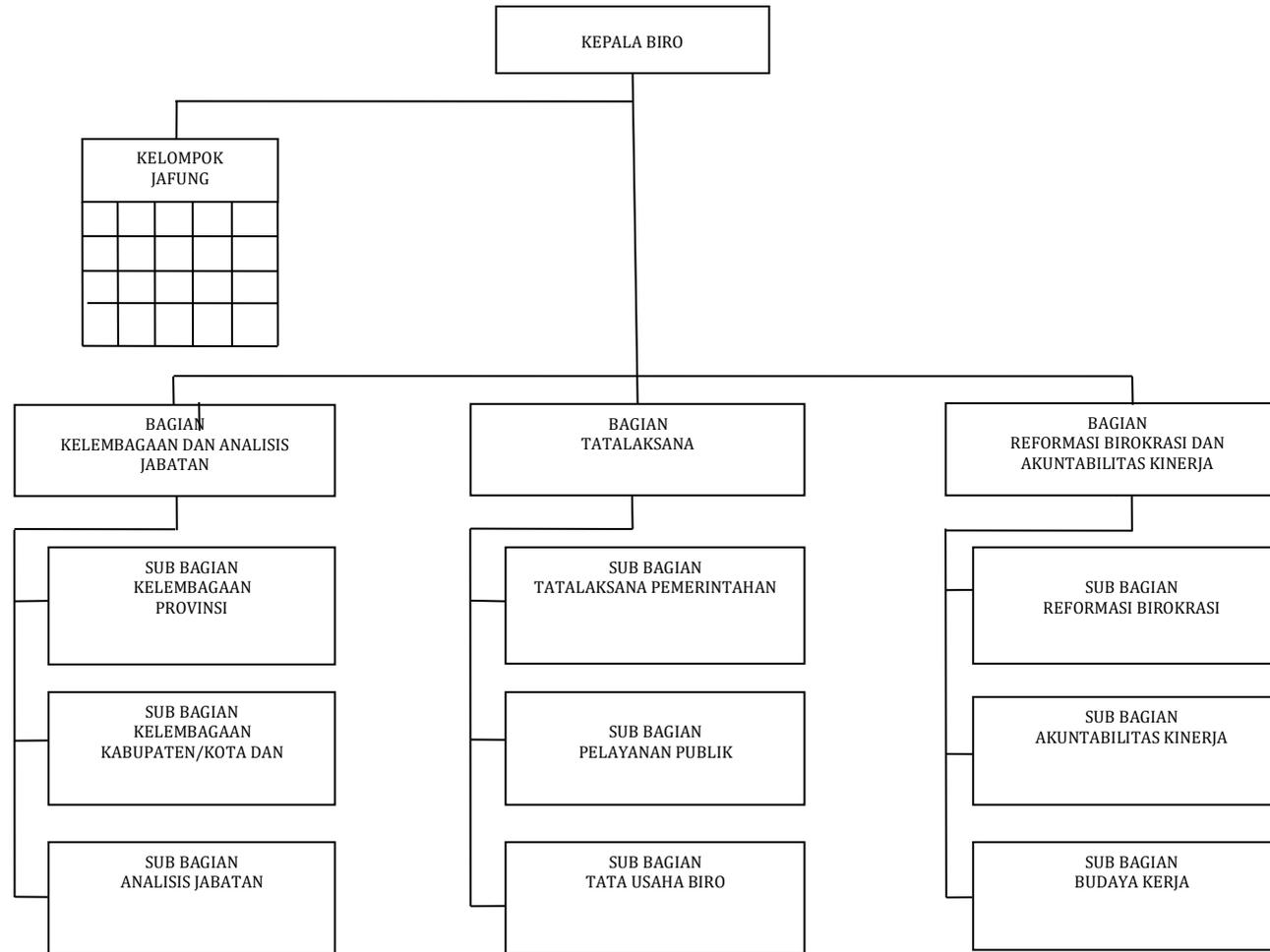
c) Sub Bagian Budaya Kerja

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro. Susunan Organisasi dapat dilihat pada gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar berikut:

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Untuk melaksanakan tugas, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi dan Umum.

Sesuai dengan susunan organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, maka tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala Biro Organisasi

Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Biro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang organisasi;
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi di bidang organisasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah provinsi, kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan analisis jabatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan serta penyusunan peta jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan dan analisis jabatan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan membawahi:

- a) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
- b) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan;
- c) Sub Bagian Analisis Jabatan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi

Sub Bagian Kelembagaan Provinsi, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Cabang Dinas, lembaga non struktural serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Kelembagaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Cabang Dinas, serta lembaga non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan Provinsi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/kota

Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota, serta fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Analisis Jabatan

Sub Bagian Analisis Jabatan, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan peta jabatan fungsional serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Analisis Jabatan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Analisis Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, uraian jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan peta jabatan fungsional serta pembinaan Kabupaten/Kota di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis jabatan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kepala Bagian Tatalaksana

Bagian Tatalaksana, mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik dan tata usaha Biro.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Tatalaksana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang ketatalaksanaan pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatalaksanaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Tatalaksana, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
- b) Sub Bagian Pelayanan Publik;
- c) Sub Bagian Tata Usaha Biro;

Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

a. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan

Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, Standar Operasional Prosedur, tata naskah dinas, sarana dan prasarana kerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang tatalaksana pemerintahan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata naskah dinas, pakaian dinas, standarisasi sarana dan prasarana kerja, peta proses bisnis dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tatalaksana pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang tatalaksana pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Pelayanan Publik

Sub Bagian Pelayanan Publik, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pelayanan Publik;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan internal dan pelayanan publik, fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara, pengelolaan pengaduan pelayanan publik, fasilitasi inovasi pelayanan publik, monitoring standar pelayanan publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan publik yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro, pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro, perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- g. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan Pegawai ASN di lingkungan biro;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di tata usaha biro;
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian tata usaha biro;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, budaya kerja serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembinaan dan pengawasan di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pada Kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
- b) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
- c) Sub Bagian Budaya Kerja.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi

Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang reformasi birokrasi berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan, pembinaan terhadap kelompok kerja 8 (delapan) area perubahan, serta fasilitasi dan verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang reformasi birokrasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntabilitas kinerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntabilitas kinerja, monitoring peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang akuntabilitas kinerja yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Budaya Kerja

Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang budaya kerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Budaya Kerja;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Budaya Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang budaya kerja, pembinaan budaya kerja, monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja, peningkatan nilai dan etika budaya kerja serta pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekretariat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang budaya kerja yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini didukung oleh 41 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin jumlah Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar sebagaimana terlihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut:

TABEL 1.1
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pasca Sarjana	6	12	18
2.	Sarjana/D-IV	8	8	16
3.	Diploma III	1	2	3
4.	SLTA	1	3	4
J U M L A H		16	25	41

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2021

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat pada **Tabel 1.2** sebagai berikut:

TABEL 1.2
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2	4
2.	Pembina (IV/a)	2	5	7
3.	Penata Tingkat I (III/d)	2	5	7
4.	Penata (III/c)	1	3	4
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	6	9
6.	Penata Muda (III/a)	6	4	10
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0
J U M L A H		16	25	41

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dari jumlah 41 orang pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, yang menduduki sebagai Jabatan Struktural sebanyak 13 pegawai terbagi atas: untuk eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 3 orang dan eselon IV.a sebanyak 9 orang.

Saat ini untuk formasi jabatan struktural telah terisi semua. Untuk lebih jelasnya susunan Pejabat Struktural dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.

TABEL 1.3
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2021

NO.	JABATAN / NAMA	PEN DI KAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
A	ESELON II.b			
	1. Rita Hastarita, S.Sos, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Biro
B	ESELON III.a			
	1. Chasmiati, S.IP, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	2. Nelly Saleha Meilani, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Kabag Tatalaksana
	3. Guruh Paryono, S.I.P., M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
C	ESELON IV.a			
	1. Wida Febriana, S.Sos, M.Si	S-2	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Kelembagaan Provinsi
	2. Kristin Novitasari, S.STP, M.Si	S-2	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Kelembagaan Kabupaten/Kota
	3. Marselinus Franata, S.STP	D-IV	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Analisis Jabatan
	4. Siti Aisyah, S.Sos	S-1	Penata (III/c)	Kasubbag Tatalaksana Pemerintahan
	5. Shinta Ikasari, S.STP	D-IV	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Pelayanan Publik
	6. Kili Palyas Natalaga, S.STP., M.E	S-2	Penata (III/c)	Kasubbag Tata Usaha Biro
	7. Sri Umiyati, S.STP, M.P.A	S-2	Pembina (IV/a)	Kasubbag Reformasi Birokrasi
	8. Glen Septian ADS, S.STP, M.A.P	S-2	Pembina (IV/a)	Kasubbag Akuntabilitas Kinerja
	9. Rani Maya Sari, S.STP, M.Si	S-2	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Budaya Kerja

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2021

TABEL 1.4
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN 2021

NO	NAMA	PEN DI DIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyu Wibowo, S.Sos, M.Si	S-2	Pembina Tk. I (IV/b)	Analisis Kepegawaian Madya
2.	Dra. Chairunnisyah, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Madya
3.	Mohammad Hidjrin Agoes Armya, S.E, M.T	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Madya
4.	Dina Meutia Sari, S.STP, M.Si	S-2	Pembina (IV/a)	Analisis Kepegawaian Madya
5.	Sukmawati, S.Sos, M.H	S-2	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Kepegawaian Pertama
6.	Florina Wiyunny, S.E	S-1	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Pertama
7.	Jalu Aji Bhaskoro, A.Md	D-3	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

Sumber: Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Periode Desember 2021

Posisi Jabatan Fungsional tertentu 7 orang PNS dan untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 21 orang PNS.

5. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Pada Tahun Anggaran 2021, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran adalah sebesar **Rp.4.198.322.500,-** yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021. Pada saat perubahan anggaran pada pertengahan tahun 2021, pagu anggaran Biro Organisasi berubah menjadi **Rp.2.122.415.830,-** yang ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada **Tabel 1.5** sebagai berikut :

TABEL 1.5
REKAPITULASI APBD PER JENIS BELANJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi			
	Belanja Barang dan Jasa	2.005.765.830,00	1.999.931.304,00	99,71
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.005.765.830,00	1.999.931.304,00	99,71
2.	Belanja Modal			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	98.153.000,00	98,15
	JUMLAH BELANJA MODAL	116.650.000,00	114.803.000,00	98,42
	JUMLAH SELURUHNYA	2.122.415.830,00	2.114.734.304,00	99,64

Sumber: Data Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2021

Dari jumlah anggaran tersebut di atas, dialokasikan untuk alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.2.005.765.830,00, dan Belanja Modal sebesar Rp.116.650.000,00. Sehingga total alokasi belanja daerah sebesar Rp.2.122.415.830,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.114.734.304,00 atau sebesar 99,64%.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati salah Gedung di Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Lantai 2 yang terletak di Jl. A. Yani Pontianak.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dapat dilihat pada **Tabel 1.6**, di bawah ini:

TABEL 1.6
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN 2021

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Station Wagon	Suzuki Grand Vitara JLX	31-12-2010	291,750,000.00	APBD
2	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivetti	31-12-2004	931,000.00	APBD
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		31-12-2006	931,000.00	APBD
4	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		31-12-2008	1,080,000.00	APBD
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		31-12-2012	3,768,475.00	APBD
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		31-12-2012	3,768,475.00	APBD
7	Mesin Penghitung Uang	Dino D-100	31-12-2017	5,027,308.00	APBD
8	Lemari Besi/Metal	Atlantic	31-12-2002	1,650,000.00	APBD
9	Lemari Besi/Metal	Atlantic	31-12-2002	1,650,000.00	APBD
10	Lemari Besi/Metal	Atlantic	31-12-2002	1,650,000.00	APBD
11	Lemari Besi/Metal	Presiden	31-12-2002	1,060,000.00	APBD
12	Lemari Besi/Metal	Sibas	31-12-2006	1,650,000.00	APBD
13	Lemari Besi/Metal	Alba	31-12-2006	2,300,000.00	APBD
14	Lemari Besi/Metal	Sibas	31-12-2008	2,697,750.00	APBD
15	Lemari Besi/Metal	Sibas	31-12-2008	2,697,750.00	APBD
16	Lemari Besi/Metal	Sibas	31-12-2008	2,697,750.00	APBD
17	Lemari Besi/Metal	brother	31-12-2018	2,985,735.00	APBD
18	Filling Besi/Metal	Alba	31-12-2000	2,000,000.00	APBD
19	Filling Besi/Metal	Alba	31-12-2006	2,000,000.00	APBD
20	Filling Besi/Metal	Delta	31-12-2006	2,100,000.00	APBD
21	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	2,702,500.00	APBD
22	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	2,702,500.00	APBD
23	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	2,702,500.00	APBD
24	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	2,702,500.00	APBD
25	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
26	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
27	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
28	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
29	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
30	Filling Besi/Metal	Ichiban	31-12-2008	1,752,000.00	APBD
31	Filling Besi/Metal		31-12-2012	1,607,885.00	APBD
32	Filling Besi/Metal	brother 4 laci	31-12-2018	2,681,130.00	APBD
33	Filling Besi/Metal	brother-2 laci	31-12-2018	1,716,797.00	APBD
34	Brankas	Cosmos 16 Sn	31-12-2005	2,850,000.00	APBD
35	Alat Penghancur Kertas	Kazure Shedder	31-12-2016	2,671,993.00	APBD
36	Mesin Absensi	Rekabio	31-12-2014	50,527,500.00	APBD
37	Meja Rapat		31-12-2013	2,105,831.00	APBD
38	Meja Tulis		31-12-2006	100,000.00	APBD
39	Meja Resepsion		31-12-2006	500,000.00	APBD
40	Meja Panjang	meja perpustakaan	31-12-2000	500,000.00	APBD
41	Meja Panjang	meja perpustakaan	31-12-2000	500,000.00	APBD
42	Meja Panjang	meja perpustakaan	31-12-2000	500,000.00	APBD
43	Kursi Rapat		31-12-2013	651,805.00	APBD
44	Kursi Rapat		31-12-2013	651,805.00	APBD
45	Kursi Rapat		31-12-2013	651,805.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
46	Kursi Rapat		31-12-2013	651,805.00	APBD
47	Kursi Tamu	Jati	31-12-2008	8,500,000.00	APBD
48	Kursi Putar	Uchiwa	31-12-2006	1,988,000.00	APBD
49	Kursi Putar	Uchiwa	31-12-2006	1,988,000.00	APBD
50	Kursi Putar	Uchiwa	31-12-2006	1,988,000.00	APBD
51	Kursi Putar	Uchiwa	31-12-2006	1,988,000.00	APBD
52	Kursi Putar		31-12-2008	405,000.00	APBD
53	Kursi Putar		31-12-2008	405,000.00	APBD
54	Kursi Putar		31-12-2008	405,000.00	APBD
55	Kursi Putar		31-12-2008	405,000.00	APBD
56	Kursi Putar		31-12-2008	405,000.00	APBD
57	Kursi Putar		31-12-2010	528,000.00	APBD
58	Kursi Putar		31-12-2010	528,000.00	APBD
59	Kursi Putar		31-12-2010	528,000.00	APBD
60	Kursi Putar		31-12-2010	528,000.00	APBD
61	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
62	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
63	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
64	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
65	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
66	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
67	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
68	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
69	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
70	Kursi Lipat	Futura	31-12-2006	200,000.00	APBD
71	Meja Komputer		31-12-2006	480,250.00	APBD
72	Meja Komputer		31-12-2006	480,250.00	APBD
73	Meja Komputer		31-12-2006	480,250.00	APBD
74	Tikar	Karpet Beludru, 270m2	31-12-2012	53,451,900.00	APBD
75	Tikar	Karpet beludru	31-12-2013	23,866,080.00	APBD
76	Meja Biro		31-12-2007	1,650,000.00	APBD
77	Meja Biro		31-12-2007	1,650,000.00	APBD
78	Meja Biro		31-12-2007	1,650,000.00	APBD
79	Meja Biro		31-12-2008	1,646,000.00	APBD
80	Meja Biro		31-12-2008	1,646,000.00	APBD
81	Meja Biro		31-12-2008	1,646,000.00	APBD
82	Meja Biro		31-12-2008	1,646,000.00	APBD
83	Meja Biro		31-12-2008	1,646,000.00	APBD
84	Meja Biro		31-12-2008	2,450,000.00	APBD
85	Meja Biro		31-12-2008	2,450,000.00	APBD
86	Meja Biro		31-12-2008	2,450,000.00	APBD
87	Meja Biro	Monaco	31-12-2008	2,467,500.00	APBD
88	Meja Biro	Monaco	31-12-2008	2,467,500.00	APBD
89	Meja Biro	Monaco	31-12-2008	2,467,500.00	APBD
90	Meja Biro	Monaco	31-12-2008	2,467,500.00	APBD
91	Meja Biro		31-12-2008	1,637,300.00	APBD
92	Meja Biro		31-12-2008	1,637,300.00	APBD
93	Meja Biro		31-12-2008	1,637,300.00	APBD
94	Meja Biro		31-12-2008	1,637,300.00	APBD
95	Meja Biro		31-12-2008	1,637,300.00	APBD
96	Meja Biro	Meja 1 Biro	31-12-2009	695,000.00	APBD
97	Meja Biro	Meja 1 Biro	31-12-2009	695,000.00	APBD
98	Meja Biro	Meja 1 Biro	31-12-2009	6,949,800.00	APBD
99	Meja Biro		31-12-2010	1,622,500.00	APBD
100	Meja Biro		31-12-2010	1,622,500.00	APBD
101	Meja Biro	Meja 1 Biro	31-12-2010	3,049,200.00	APBD
102	Meja Biro	Meja 1 Biro	31-12-2010	3,049,200.00	APBD
103	Sofa		31-12-2006	8,000,000.00	APBD
104	Sofa		31-12-2013	10,562,500.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
105	Sofa		31-12-2014	17,344,944.00	APBD
106	Mesin Penghisap Debu	Sharp	31-12-2010	1,538,050.00	APBD
107	Lemari Es	Sanyo	31-12-2009	2,453,000.00	APBD
108	AC Unit	Panasonic	31-12-2006	13,000,000.00	APBD
109	AC Unit	LG 1,5 PK	31-12-2013	5,160,270.00	APBD
110	AC Unit	LG 1 PK	31-12-2013	3,754,460.00	APBD
111	AC Unit	LG 2 PK	31-12-2013	6,644,160.00	APBD
112	AC Unit	LG 2 PK	31-12-2013	6,644,160.00	APBD
113	AC Unit	LG 1 PK	31-12-2013	3,754,460.00	APBD
114	AC Unit	LG 1 PK	31-12-2013	3,754,460.00	APBD
115	AC Unit	GREE	31-12-2016	8,525,647.00	APBD
116	AC Unit	GREE	31-12-2016	8,525,647.00	APBD
117	AC Unit	Gree 2PK	31-12-2017	7,597,861.00	APBD
118	AC Unit	Gree 2PK	31-12-2017	7,597,861.00	APBD
119	AC Split	AUX	31-12-2018	7,475,221.00	APBD
120	Exhaust Fan	Sanyo	31-12-2011	1,800,000.00	APBD
121	Exhaust Fan	Sanyo	31-12-2011	1,800,000.00	APBD
122	Televisi	LG	31-12-2006	21,700,000.00	APBD
123	Televisi		31-12-2009	11,599,500.00	APBD
124	Televisi	21"	31-12-2010	1,743,150.00	APBD
125	Amplifier		31-12-2006	2,100,000.00	APBD
126	Sound System	Surround	31-12-2006	4,800,000.00	APBD
127	Sound System	Surround	31-12-2006	4,800,000.00	APBD
128	Wireless		31-12-2006	700,000.00	APBD
129	Wireless	JMK	31-12-2013	6,417,771.00	APBD
130	Microphone		31-12-2006	1,800,000.00	APBD
131	Tangga Aluminium	Bina Karya	31-12-2013	745,071.00	APBD
132	Kaca Hias		31-12-2005	800,000.00	APBD
133	Lambang Instansi	Gambar Gubernur/Istri	31-12-2006	60,000.00	APBD
134	Lambang Instansi	Gambar Gubernur/Istri	31-12-2006	60,000.00	APBD
135	Lambang Instansi	Gambar Gubernur/Istri	31-12-2006	60,000.00	APBD
136	P.C. Unit	LG (Komputer Jaringan)	31-12-2008	16,266,667.00	APBD
137	P.C. Unit	LG (Komputer Jaringan)	31-12-2008	16,266,667.00	APBD
138	P.C. Unit	LG (Komputer Jaringan)	31-12-2008	16,266,666.00	APBD
139	P.C. Unit	Core2Duo E 7500	31-12-2010	5,639,500.00	APBD
140	P.C. Unit	Core2Duo E 7500	31-12-2010	5,639,500.00	APBD
141	P.C. Unit	Intel Core i3-2120/3.3GHZ	31-12-2012	6,979,027.00	APBD
142	P.C. Unit	Intel Core i3-2120/3.3GHZ	31-12-2012	6,979,027.00	APBD
143	P.C. Unit	Intel Core i3-2120/3.3GHZ	31-12-2012	6,979,027.00	APBD
144	P.C. Unit		31-12-2012	6,974,180.00	APBD
145	P.C. Unit		31-12-2012	6,974,180.00	APBD
146	P.C. Unit	Dell	31-12-2013	9,000,924.00	APBD
147	P.C. Unit	Dell	31-12-2013	9,000,924.00	APBD
148	P.C. Unit	Intel	31-12-2013	7,080,000.00	APBD
149	P.C. Unit	Intel Xeon	31-12-2014	45,446,000.00	APBD
150	P.C. Unit	PC AIO LENOVO C 4030	31-12-2015	15,838,973.00	APBD
151	P.C. Unit	Komputer PC LG Core i3	31-12-2015	7,850,380.00	APBD
152	P.C. Unit	HP	31-12-2016	8,501,794.00	APBD
153	P.C. Unit	HP	31-12-2016	8,501,794.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
154	P.C. Unit	HP	31-12-2016	8,501,794.00	APBD
155	P.C. Unit	HP	31-12-2016	8,501,794.00	APBD
156	P.C. Unit	ASUS	31-12-2017	16,576,965.00	APBD
157	P.C. Unit	AIO	31-12-2017	16,473,035.00	APBD
158	P.C. Unit	Lenovo/AIO	31-12-2017	12,025,118.00	APBD
159	P.C. Unit	HP/ALL-In One PC20-C317D	31-12-2018	8,020,996.00	APBD
160	Lap Top		31-12-2012	8,029,353.00	APBD
161	Lap Top		31-12-2012	8,029,353.00	APBD
162	Lap Top		31-12-2012	8,029,353.00	APBD
163	Lap Top		31-12-2012	8,029,353.00	APBD
164	Lap Top	LENOPO IDEAPAD/320/141KB	31-12-2018	8,020,996.00	APBD
165	Lap Top	LENOPO IDEAPAD/320/141KB	31-12-2018	8,020,996.00	APBD
166	Lap Top	LENOPO IDEAPAD/320/141KB	31-12-2018	8,020,996.00	APBD
167	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2008	12,980,000.00	APBD
168	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2008	13,750,000.00	APBD
169	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2008	13,750,000.00	APBD
170	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2008	12,000,600.00	APBD
171	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2009	12,750,000.00	APBD
172	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2010	8,818,150.00	APBD
173	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2010	8,818,150.00	APBD
174	Note Book/NetBook	Acer 4750G-24	31-12-2011	9,432,700.00	APBD
175	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
176	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
177	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
178	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
179	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
180	Note Book/NetBook	Toshiba	31-12-2013	8,493,519.00	APBD
181	Note Book/NetBook	Asus	31-12-2014	10,100,200.00	APBD
182	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2016	11,609,918.00	APBD
183	Note Book/NetBook	Acer	31-12-2016	11,609,918.00	APBD
184	Note Book/NetBook	ASUS	31-12-2017	15,056,660.00	APBD
185	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
186	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
187	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
188	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
189	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
190	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
191	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
192	Printer	Canon Pixma	31-12-2016	1,203,500.00	APBD
193	Printer	Epson LX-310	31-12-2017	3,011,330.00	APBD
194	Printer	Epson L455	31-12-2017	5,027,308.00	APBD
195	Printer	Epson L455	31-12-2017	5,027,308.00	APBD
196	Monitor	Flatron ez T 530S	31-12-2007	4,072,000.00	APBD
197	Monitor	Flatron ez T 530S	31-12-2007	4,072,000.00	APBD
198	Monitor		31-12-2012	1,959,605.00	APBD
199	Monitor		31-12-2012	1,959,605.00	APBD
200	Monitor		31-12-2012	1,959,605.00	APBD
201	Printer	Canon PIXMA IP 258	31-12-2010	922,850.00	APBD
202	Printer	Canon PIXMA IP 258	31-12-2010	922,850.00	APBD
203	Printer	Canon IP 2770	31-12-2012	964,548.00	APBD
204	Printer	Canon IP 2770	31-12-2012	964,548.00	APBD
205	Printer	Canon IP 2770	31-12-2012	964,548.00	APBD
206	Printer	Epson LQ 2180	31-12-2012	8,067,639.00	APBD
207	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
208	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
209	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
210	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
211	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
212	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
213	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
214	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
215	Printer		31-12-2012	949,655.00	APBD
216	Printer	Canon Pixma MX457	31-12-2013	2,228,170.00	APBD
217	Printer	Canon Pixma MX457	31-12-2013	2,228,170.00	APBD
218	Printer	Canon Pixma MX457	31-12-2013	2,228,170.00	APBD
219	Printer	Epson	31-12-2013	8,178,000.00	APBD
220	Printer	Epson	31-12-2013	8,178,000.00	APBD
221	Printer	HP Laser Jet P1102	31-12-2015	1,658,531.00	APBD
222	Printer	Canon 6560 A3	31-12-2015	4,312,181.00	APBD
223	Printer	Epson L 360	31-12-2018	2,433,957.00	APBD
224	Printer	Epson L 360	31-12-2018	2,433,957.00	APBD
225	Printer	Epson L 360	31-12-2018	2,433,957.00	APBD
226	Printer	Epson L 360	31-12-2018	2,433,957.00	APBD
227	Printer	Epson	31-12-2018	5,200,000.00	APBD
228	Meja Kerja Pejabat Eselon II		31-12-2000	850,000.00	APBD
229	Meja Kerja Pejabat Eselon II		31-12-2000	850,000.00	APBD
230	Meja Kerja Pejabat Eselon III		31-12-2000	650,000.00	APBD
231	Meja Kerja Pejabat Eselon III		31-12-2000	650,000.00	APBD
232	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD
233	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD
234	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	31-12-2006	400,000.00	APBD
235	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	31-12-2006	400,000.00	APBD
236	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	31-12-2006	400,000.00	APBD
237	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	31-12-2006	400,000.00	APBD
238	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2006	400,000.00	APBD
239	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2006	400,000.00	APBD
240	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2006	400,000.00	APBD
241	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2006	675,000.00	APBD
242	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		31-12-2001	601,000.00	APBD
243	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2001	601,000.00	APBD
244	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2001	601,000.00	APBD
245	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD
246	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
247	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD
248	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marco	31-12-2002	650,000.00	APBD
249	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		31-12-2006	330,000.00	APBD
250	Meja Tamu Biasa	Meja Sofa	31-12-2006	300,000.00	APBD
251	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
252	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
253	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
254	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
255	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
256	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
257	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
258	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
259	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
260	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
261	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
262	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	1,186,500.00	APBD
263	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
264	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
265	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
266	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
267	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
268	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2000	445,000.00	APBD
269	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		31-12-2001	445,000.00	APBD
270	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2001	445,000.00	APBD
271	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		31-12-2006	445,000.00	APBD
272	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Monaco	31-12-2006	445,000.00	APBD
273	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2008	445,000.00	APBD
274	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2008	445,000.00	APBD
275	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	31-12-2008	445,000.00	APBD
276	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2010	962,500.00	APBD
277	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2010	962,500.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
278	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2010	962,500.00	APBD
279	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		31-12-2010	962,500.00	APBD
280	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
281	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
282	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
283	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
284	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
285	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
286	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
287	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
288	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
289	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni 910a	31-12-2008	445,000.00	APBD
290	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
291	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
292	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
293	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
294	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
295	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
296	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
297	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	31-12-2000	445,000.00	APBD
298	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
299	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
300	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
301	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
302	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
303	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
304	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
305	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
306	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
307	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
308	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
309	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
310	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
311	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
312	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Fantoni (Kursi Hadap)	31-12-2008	457,500.00	APBD
313	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Kursi Hadap	31-12-2010	610,000.00	APBD
314	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Kursi Hadap	31-12-2010	610,000.00	APBD
315	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		31-12-2003	4,000,000.00	APBD
316	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	31-12-2006	1,112,000.00	APBD
317	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	31-12-2008	1,112,000.00	APBD
318	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		31-12-2012	2,361,575.00	APBD
319	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		31-12-2012	2,361,575.00	APBD
320	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis		31-12-2012	2,361,575.00	APBD
321	Camera Digital	Canon EOS 650 D	31-12-2013	8,608,838.00	APBD
322	LCD Projector/Infocus	Acer	31-12-2009	8,000,000.00	APBD
323	LCD Projector/Infocus	Canon	31-12-2013	4,612,773.00	APBD
324	LCD Projector/Infocus	Layar Infocus (Acer)	31-12-2013	892,472.00	APBD
325	LCD Projector/Infocus	Layar Infocus (Acer)	31-12-2013	892,472.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
326	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Canon	31-12-2006	5,700,000.00	APBD
327	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Canon	31-12-2006	5,700,000.00	APBD
328	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Canon	31-12-2006	5,700,000.00	APBD
329	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2008	1,500,000.00	APBD
330	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2008	1,500,000.00	APBD
331	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2008	1,500,000.00	APBD
332	Uninterruptible Power Supply (UPS)	UPS ICA 1200 VA	31-12-2010	1,492,678.00	APBD
333	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA-CP1400	31-12-2011	1,462,820.00	APBD
334	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA-CP1400	31-12-2011	1,462,820.00	APBD
335	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	592,905.00	APBD
336	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	592,905.00	APBD
337	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	592,905.00	APBD
338	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	592,905.00	APBD
339	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	902,005.00	APBD
340	Uninterruptible Power Supply (UPS)		31-12-2012	902,005.00	APBD
341	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Power Pro/R1200 VA	31-12-2013	915,714.00	APBD
342	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	31-12-2014	1,006,000.00	APBD
343	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	31-12-2014	1,006,000.00	APBD
344	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	31-12-2014	1,006,000.00	APBD
345	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
346	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
347	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
348	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
349	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
350	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
351	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
352	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-12-2016	1,656,194.00	APBD
353	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ica/cp1400	31-12-2018	1,408,074.00	APBD
354	Digital Versatile Disc/ Digital Video Disc	Dats	31-12-2006	1,350,000.00	APBD
355	Mesin Pembuat Huruf	Alat Cetak Name Tag	31-12-2009	45,837,000.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
356	P.C. Unit	Komputer Note Book Toshiba Satellite L840-1045X Black	31-12-2013	10,201,000.00	APBD
357	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1974	150,000.00	APBD
358	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1974	150,000.00	APBD
359	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1974	150,000.00	APBD
360	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1975	200,000.00	APBD
361	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1975	200,000.00	APBD
362	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1975	200,000.00	APBD
363	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1975	200,000.00	APBD
364	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Perpustakaan	31-12-1975	200,000.00	APBD
365	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Buku	31-12-1995	158,000.00	APBD
366	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	lemari buku	31-12-1997	350,000.00	APBD
367	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Untuk Buku Perpustakaan	31-12-1998	350,000.00	APBD
368	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	Lemari Buku KY908-4	31-12-2008	6,416,500.00	APBD
369	Kalkulator		31-12-2012	150,740.00	APBD
370	Kalkulator		31-12-2012	150,740.00	APBD
371	wireless		31-12-2014	394,300.00	APBD
372	Kamera Digital		13-05-2019	11,087,986.00	APBD
373	P.C Unit		04-07-2019	8,282,247.00	APBD
374	P.C Unit		04-07-2019	8,282,247.00	APBD
375	Proyektor Romad Complet		18-10-2019	8,426,869.00	APBD
376	Uninterruptible Power Supply (UPS)		25-07-2019	1,154,495.00	APBD
377	Uninterruptible Power Supply (UPS)		25-07-2019	1,154,495.00	APBD
378	Uninterruptible Power Supply (UPS)		25-07-2019	1,154,495.00	APBD
379	Kursi Tamu		27-11-2019	8,846,916.00	APBD
380	Meja 1/2 Biro		18-07-2019	2,496,338.00	APBD
381	Meja 1/2 Biro		18-07-2019	2,496,338.00	APBD
382	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota		18-07-2019	3,811,815.00	APBD
383	Kursi Putar		18-07-2019	692,673.00	APBD
384	Kursi Putar		18-07-2019	692,673.00	APBD
385	Kursi Biasa		18-07-2019	979,494.00	APBD
386	Kursi Biasa		18-07-2019	979,494.00	APBD
387	Kursi Biasa		18-07-2019	979,494.00	APBD
388	Kursi Biasa		18-07-2019	979,494.00	APBD
389	P.C Unit		05-08-2019	9,475,995.00	APBD
390	Lap Top		05-08-2019	8,355,130.00	APBD
391	Printer (Peralatan Personal Komputer)		17-06-2019	3,986,521.00	APBD
392	Printer (Peralatan Personal Komputer)		17-06-2019	3,986,522.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
393	Printer (Peralatan Personal Komputer)		17-06-2019	2,319,029.00	APBD
394	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		17-06-2019	6,460,152.00	APBD
395	A.C. Split		21-06-2019	10,570,920.00	APBD
396	Hard Disk		01-12-2019	825,000.00	APBD
397	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT 382B –	13-04-2020	2,502,392.00	APBD
398	A.C. Split	MIDEA MSBC-18CRN1	02-04-2020	8,024,056.00	APBD
399	Thermo Gun	Thermo Gun WK-168	07-08-2020	753,732.00	APBD
400	Thermo Gun	Thermo Gun WK-168	07-08-2020	753,732.00	APBD
401	Thermo Gun	Thermo Gun WK-168	07-08-2020	753,732.00	APBD
402	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	04-11-2020	9,949,268.00	APBD
403	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	04-11-2020	9,949,268.00	APBD
404	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	04-11-2020	9,949,268.00	APBD
405	P.C Unit	Merk PC AIO ASUS Type V222 UAK	04-11-2020	9,949,268.00	APBD
406	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
407	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
408	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
409	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
410	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
411	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
412	Lap Top	Merk Asus ExpertBook Type P1440FA	23-11-2020	8,039,812.00	APBD
413	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5-113507	23-11-2020	15,074,649.00	APBD
414	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5-113507	23-11-2020	15,074,649.00	APBD
415	Lap Top	Merk Dell XPS Type 139310i5-113507	23-11-2020	15,074,649.00	APBD
416	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Model : Flustek PS283	04-11-2020	5,969,561.00	APBD
417	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	31-03-2020	1,859,206.00	APBD
418	Mesin Absensi	Fingerprint Solution, Type X 401	31-03-2020	6,667,015.00	APBD
419	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	16-11-2020	4,974,634.00	APBD
420	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	16-11-2020	4,974,634.00	APBD
421	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L6170	16-11-2020	4,974,634.00	APBD
422	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	16-11-2020	2,964,681.00	APBD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6
423	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	16-11-2020	2,964,681.00	APBD
424	Karpet	NOBEL CARPET JAWA	27-04-2020	18,345,766.00	APBD
425	Monitor	Merk LG 32 ML, 600 -32 M Type. IPS VGA HDMI	19-10-2020	5,000,000.00	APBD
426	Digital LED Running Text	Buatan Lokal /Costum	19-10-2020	2,500,000.00	APBD
427	Sepeda Motor	Yamaha	31-12-2013	16,288,575.00	APBD
428	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
429	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
430	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
431	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
432	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
433	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
434	Papan Visual/Papan Nama	Buatan Lokal	25-06-2021	1,900,000.00	APBD
435	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	1,950,000.00	APBD
436	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	600,000.00	APBD
437	Papan Visual/Papan Nama	Buatan lokal	25-06-2021	800,000.00	APBD
	JUMLAH			1,953,021,567.00	

Sumber : Data Aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2021

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Secara umum yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur.
- 2) Belum optimalnya penataan Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis kinerja.
- 3) Kebijakan yang mengatur kelembagaan secara nasional bersifat dinamis sehingga memiliki konsekuensi terhadap perubahan Peta Jabatan, Anjab dan ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
- 4) Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
- 6) Belum optimalnya kinerja, Perjanjian Kerja, LKj dan Perjanjian perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SAKIP.
- 8) Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Prov. Kalbar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

1. Visi

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki Visi dan Misi khusus, namun Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Adapun Visi tersebut adalah **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**.

2. Misi

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- a. **Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
- b. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu, dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi Bagian Selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

- c. **Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Peningkatan Pendidikan dan Derajat Kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis antar kelompok etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003: 9).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran selaras dengan kinerjanya	46%	51%	
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah			100%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori Baik	83%	85%	
		Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase kebijakan ketatalaksanaan yang ditetapkan	100%	100%	
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar			84
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan eformasi Birokrasi	-	10 PD	
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas			100%
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP nilai pelaporan kinerja	10,5	11	
	Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja			11,5

Sumber Data : Renstra Perubahan Biro Organisasi periode 2018-2023

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJANKIN) TAHUN 2021

Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Organisasi	Rp. 1.497.362.336,00	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 625.053.494,00	APBD
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis	Rp. 2.122.415.830,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pengukuran target kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Biro Organisasi Setda. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, sebagai berikut:

**TABEL 3.1
PENGUKURAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%	100%	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84	85.01	101,2
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	95%	95
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11,5	N/A	N/A

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%	100%	100
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran "***meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah***", mencapai **100%** atau dapat dikategorikan "***Berhasil***". Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Program Penataan Organisasi	549.371.586	549.165.600	99,96	100%	0,04%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,96% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,04%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Kegiatan ini telah dengan realisasi fisik sebesar 100% pada Januari s/d Desember 2021 melalui beberapa subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi terealisasi sebesar Rp.222.370.550,- atau sebesar 100% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
 - i. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebanyak 2 Rapergub Perangkat Daerah dan jumlah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dilakukan perubahan dan pembentukan sebanyak 47 Pergub Perangkat Daerah, jadi indikator hasil kinerja sebesar 2.350%.
 - ii. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Updating Database Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2021 sebesar 0%.
 - iii. Capaian kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2021 yaitu Persentase Jumlah UPT Yang Dilakukan Penataan.
 - iv. Capaian kinerja dari kegiatan updating database kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 sebesar 0%.
- 2) Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp.181.835.700,- atau sebesar 99,99% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
 - i. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan tersusunnya Tim Pelaksana Kegiatan dan terselenggaranya kegiatan Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia dan Pertemuan Penguatan Peran Dharma Wanita Persatuan Bagi Istri Sekretaris Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat yaitu tersusunnya Surat Keputusan Komisariat Wilayah Forsesdasi Provinsi Kalimantan Barat adalah terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dengan target 100%.
 - ii. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan pembinaan penataan perangkat daerah kabupaten/kota ini yaitu Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan terhadap penataan perangkat daerah dengan baik dengan target 100% dan capaian indikator tersebut sebesar 100% yaitu 14 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kegiatan pembinaan penataan perangkat sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan penataan organisasi.
 - iii. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota ini yaitu Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan terhadap

penataan perangkat daerah dengan baik dengan target 100% dan capaian indikator tersebut sebesar 100% yaitu 14 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- iv. Capaian Kinerja dari Sub Sub kegiatan Rapat Koordinasi secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2020 Pukul 09.00 WIB- Selesai berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Nomor 061.1/2338/OR-A, Tanggal 14 September 2020, Tentang Rapat Koordinasi Pembinaan Kabupaten/Kota pada Bidang Organisasi.
- 3) Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan terealisasi sebesar Rp.144.959.350,- atau sebesar 99,87% dengan capaian fisik sebesar 100% yang terdiri dari beberapa sub sub kegiatan sebagai berikut:
- i. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2021 telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen SKJ Pimpinan Tinggi sebanyak 6 (enam) dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap penyusunan dokumen SKJ Pimpinan Tinggi telah melampaui target kinerja yang ditentukan pada T.A 2021. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai ditahun 2021 telah mencapai sebesar 150%.
 - ii. Capaian Kinerja dari Sub Sub Kegiatan Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 6 (enam) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2021 hanya berhasil menyelesaikan Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi, kamus Kompetensi Teknis dan telah disampaikan Ke kementerian PAN dan RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) dokumen. Hal ini disebabkan karena sampai dengan batas akhir tahun anggaran berjalan, hanya terdapat sebanyak 4 (empat) perangkat daerah yang menyampaikan dan menindaklanjuti surat permintaan penyusunan SKJ Administrasi dan penegasannya. Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat mencapai target output maksimal sebagaimana telah ditetapkan pada T.A 2021. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target output yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target output yang berhasil dicapai ditahun 2021 mencapai sebesar 66,67%.
 - iii. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8 (delapan) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2021 telah berhasil menyelesaikan verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap verifikasi penyusunan analisis beban kerja telah melampaui target

kinerja yang ditentukan pada T.A 2021. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai ditahun 2021 telah mencapai sebesar 987,5 %. Hal ini disebabkan dengan dukungan tambahan personl pada Sub Bagian Analisis Jabatan yaitu sebanyak 5 (lima) orang analis kepegawaian, yang terdiri dari 4 (empat) Analis Kepegawaian Ahli Madya dan 1 (satu) Analis Kepegawaian Ahli Pertama.

- iv. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2021 telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sebanyak 1 (satu) dokumen.

Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap penyusunan dokumen Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional telah mencapai target kinerja yang ditentukan pada T.A 2021. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target yang telah dicapai ditahun 2020 telah mencapai sebesar 100%.

- v. Capaian Kinerja Dari Sub Sub Kegiatan Verifikasi Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Bersamaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar pada T.A 2021 memverifikasi sebanyak 5 (lima) dokumen evaluasi jabatan. Hal ini disebabkan karena hanya 5 (lima) perangkat daerah saja yang menyapaikan dokumen evaluasi jabatan.

a) Dengan demikian, keberhasilan capaian target kinerja terhadap Verifikasi Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat mencapai target output maksimal sebagaimana telah ditetapkan pada T.A 2021. Dengan kata lain jika dihitung berdasarkan pendekatan nilai persentase, maka target output yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan target output yang berhasil dicapai ditahun 2021 mencapai sebesar 50%.

b) Pengumpulan data/informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

c) Melakukan kunjungan ke seluruh Perangkat Daerah guna mendapatkan data/informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

d) Konsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai permasalahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Output kegiatan berupa:

a) Rekap Data/informasi hasil monitoring dan evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

b) Laporan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020:

- 1) Rekap Data/informasi hasil monitoring dan evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.
- 2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019-2021 dan target RPJMD

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2019-2021 DAN TARGET RPJMD
SASARAN STRATEGIS 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan berbasis Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran selaras dengan kinerjanya	73	51					
	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah			100	100%	100%	100%	

Pada tahun 2019 persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi, tepat ukuran, dan berbasis kinerja ditargetkan 46%, terealisasi sebesar 73% dengan capaian kinerja sebesar 158%. Pada tahun 2020 persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi, tepat ukuran, dan berbasis kinerja sebanyak 51% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sementara pada tahun 2021 Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Perkiraan untuk Target Tahun 2022 sampai tahun 2023 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2021 dikarenakan indikator kinerja diatas sudah diproyeksi akan tercapai sesuai dengan target.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Pada Sub Subkegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi masih ditemukan adanya sedikit perbedaan antara nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang ditetapkan Kementerian PANRB

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah dengan nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang diadopsi/digunakan oleh pemerintah Prov. Kalbar. Perbedaan yang tidak signifikan ini tetap berpengaruh pada proses penyusunan SKJ Pimpinan Tinggi, khususnya pada Kompetensi Teknis yang harus dirumuskan dan disusun kembali dengan menyesuaikan dengan kebutuhan serta divalidasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KemenPANRB baru kemudian dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pada Sub Subkegiatan Penataan UPT terdapat kendala penerbitan/revisi pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang organisasi akan membawa implikasi terhadap organisasi perangkat daerah dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk diimplementasikan ke Pemerintah Daerah.

Tidak tersedianya dana pada sub subkegiatan updating Database Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dikarenakan refocusing jadi kegiatan ini tidak dapat terlaksana.

Pada Sub Subkegiatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan mengenai penyetaraan birokrasi mengenai penyusunan atau mekanisme untuk membuat Pergub tentang Perangkat Daerah belum ada.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan analisis jabatan dilakukan dengan via zoom meeting.

Pada Pelaksanaan Sub Subkegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka perlu keseriusan, ketekunan, ketelitian, peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya terkait tugas teknis pada semua perangkat daerah, serta kesempatan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan berbagai Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TABEL 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84	85.01	101,2%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					

Realisasi capaian kinerja IKM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang berkategori baik ditargetkan sebanyak 84 dan terealisasi sebanyak 85,01 dengan capaian kinerja sebesar 101,2%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.6
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(%)	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Program Penataan Organisasi	365.858.400	365.858.400	100	101,2	1,2%

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 100%, realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,2%, maka pada sasaran ini terdapat Cost Cutting Program efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,2%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai 3 output dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Persentase Perangkat Daerah dengan standar pelayanan publik yang baik dan berkualitas (zona hijau) dengan realisasi sebesar 103,45% dengan capaian kinerja 90%.
- b. Persentase perangkat daerah yang menetapkan dokumen tatalaksana (SOP dan Peta Proses Bisnis) dengan realisasi sebesar 50% dengan capaian output kinerja 50%.
- c. Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dengan realisasi sebesar 0% dengan capaian output kinerja 0%.

Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh dua subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:
 - i. Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan. Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar Tahun 2020 adalah 84,18 dengan kategori Baik (B). Nilai ini meningkat 0,71 poin dari tahun sebelumnya (2019) yaitu 83,47.
 2. Untuk Tahun 2020, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah (100 %), 9 (sembilan) Biro (100 %), dan 31 (tiga puluh satu) UPT (57,41 %) di lingkungan Pemprov Kalbar yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
 3. Dari 110 (seratus sepuluh) UPP Pemprov Kalbar, yang menyampaikan laporan SKM Tahun 2020 sebanyak 87 UPP terdiri dari 14 (empat belas) UPP atau 16,09% meraih IKM dengan kategori A (Sangat Baik), yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (92,93), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (92,80), Dinas Komunikasi dan Informatika (91,13), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (90,82), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (90,13), Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (89,44), Dinas Sosial (88,88), Dinas Perkebunan (88,86), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (88,58), Biro Administrasi Pembangunan (88,52), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (88,47), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (88,43), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (88,32), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (88,31).
 4. Mayoritas UPP Pemprov Kalbar yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) atau 81,61% mendapatkan IKM pada kategori Baik (B) dengan rentang Nilai 76,61 – 88,30. Namun masih terdapat 2 (dua) UPP atau 2,30% yang mendapatkan kategori Kurang Baik (C) dan tidak ada UPP atau 0% yang mendapatkan kategori Tidak Baik (D).
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemprov Kalbar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2015, nilai IKM Pemprov Kalbar berada pada posisi 74,32 dan meningkat 2,17 poin menjadi 76,49 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6 poin dari tahun 2016, menjadi menjadi 82,49. Pada tahun 2018, nilai IKM Pemprov Kalbar adalah 83,22 dan terjadi peningkatan sebesar 0,73 poin dari tahun 2017. Nilai IKM Pemprov Kalbar pada tahun 2019 adalah 83,47 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 0,71 poin sehingga nilai IKM Pemprov Kalbar tahun 2020 adalah 84,18.
 6. Dari hasil nilai IKM per unsur layanan, seluruh unsur pelayanan telah berada pada kategori Baik (B) bahkan terdapat unsur pelayanan yang mendapatkan kategori Sangat Baik (A). Dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan, Penanganan Pengaduan merupakan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai persepsi kepuasan tertinggi dari masyarakat/responden

dengan nilai 3,54 dan berada pada kategori Sangat Baik (A). Adapun untuk unsur pelayanan terendah yaitu Sarana Prasarana dengan nilai 3,24 yang berada dalam kategori Baik (B).

7. Beragamnya data profil masyarakat / responden dengan jumlah total 4.901 (empat ribu sembilan ratus satu) orang yang mengisi kuesioner SKM untuk mewakili para penerima layanan. Hal ini dilihat dari jumlah total responden yang cukup banyak, juga terlihat dari beragamnya latar belakang responden, baik itu dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, maupun pekerjaan.
 8. IKM rata-rata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat tahun 2020 adalah 83,46 dengan kategori Baik.
 9. Dari 14 (empat belas) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat, seluruhnya (100%) telah menyampaikan Laporan SKM Tahun 2020.
 10. Nilai rata-rata IKM Kabupaten / Kota se-Kalbar pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,60 poin dibandingkan tahun 2019 dari 82,86 (2019) menjadi 83,46 (2020). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai IKM pada beberapa kabupaten meskipun terdapat pula Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai IKM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, dalam 5 (lima) tahun terakhir nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar sejak tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu tahun 2015 dengan 75,53 meningkat 2,05 poin menjadi 77,58 pada tahun 2016, setelah itu meningkat 2,5 poin menjadi 80,08 pada tahun 2017, kemudian meningkat 3,49 poin menjadi 83,57 pada tahun 2018, dan terjadi sedikit penurunan sebesar 0,71 poin sehingga nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2019 menjadi 82,86. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan 0,60 poin sehingga nilai rata-rata IKM Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun 2020 menjadi 83,46.
 11. Nilai IKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota se-Kalbar tahun 2020 berada pada Kota Pontianak dengan nilai IKM 88,53 dengan kategori Sangat Baik (A). Kota Pontianak juga menjadi Kabupaten/Kota se-Kalbar yang memiliki UPP terbanyak dalam hal pelaksanaan dan pelaporan SKM yaitu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) UPP yang terdiri dari Perangkat Daerah, UPT, Kecamatan, dan Puskesmas.
 12. Nilai IKM Provinsi Kalbar tahun 2020 yang merupakan nilai rata-rata IKM Pemprov Kalbar (84,18) dan nilai IKM Kabupaten/Kota (83,46) adalah 83,82. Nilai ini mengalami peningkatan 0,65 poin dari tahun 2019, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai rata-rata IKM Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kalbar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai IKM Provinsi mengalami peningkatan dari semula 74,93 pada tahun 2015 sehingga pada tahun 2020 meningkat menjadi 83,82.
- ii. Jumlah Inovasi pelayanan publik Provinsi Kalbar dengan realisasi sebesar 125% dengan capaian kinerja 35 Inovasi.
 - iii. Jumlah PD/ Biro yang dimonitoring dan dievaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro. Untuk pencapaian jumlah Perangkat Daerah / Biro / UPT yang dimonitoring dan dievaluasi dapat dikatakan mencapai 100%, ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 berjumlah 114 Perangkat Daerah / Biro / UPT tetapi pada Perda Nomor 11 Tahun 2019 berubah menjadi 102 Perangkat Daerah / Biro / UPT.

- iv. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100 Peserta. Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :
 1. Terlaksananya Penandatanganan Nota Kesepakatan Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Penyerahan DPA-SKPD Tahun 2021 dari Gubernur Kalimantan Barat kepada Kepala Perangkat Daerah.
 3. Tercapainya Penandatanganan Komitmen Inovasi Pelayanan Publik dan Penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi
- v. Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung dengan realisasi sebesar 233% dengan capaian kinerja 14 Kab/ Kota. Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :
 1. Untuk tahun 2021 evaluasi Indeks Pelayanan Publik telah dilakukan pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, untuk Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kepmenpan Nomor 1008 Tahun 2001 evaluasi dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB secara langsung, karena adanya penetapan pemprov, kabupaten, kota, dan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai lokasi evaluasi pelayanan public sedangkan 13 Kab/Kota lainnya evaluasi dilakukan oleh Tim Biro Organisasi yang ditunjuk oleh Kementerian PANRB sebagai evaluator berdasarkan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2021 tentang Tim Pendampingan, Monitoring, dan evaluasi pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.
 2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dievaluasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); serta UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I (SAMSAT) Provinsi Kalbar.
3. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemprov Kalbar pada tahun 2021 masih menunggu hasil dari Kementerian PAN dan RB.
 - 2) Subkegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:
 - i. Jumlah Perangkat Daerah/Biro yang dimonitoring dan dievaluasi (Peta proses Bisnis, SOP, Tata Naskah Dinas) dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektornik ini adalah Jumlah peserta sebanyak 94 orang dari seluruh PD/Biro dan 55 orang UPT dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan bahwa peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah 94 orang dari seluruh PD/Biro dan

55 orang UPT dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga didalam kegiatan sosialisasi ini juga memberikan penggunaan tata cara Aplikasi Kapuas (Aplikas Pendukung Administrasi Surat) yang mana aplikasi ini merupakan hasil dari Tata Naskah Dinas Elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- ii. Jumlah Perangkat Daerah/ Biro yang SOP telah diverifikasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan SOP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Jumlah Perangkat Daerah/ Biro yang SOPnya telah diverifikasi sebanyak 47 Perangkat Daerah pada kesempatan pertama adalah verifikasi SOP khusus lingkungan Sekretariat atau kasubag dibawah Sekretaris untuk perangkat daerah dan kasubag TU untuk Biro, selanjutnya masing-masing bidang juga telah dimintakan untuk menyusun SOP dengan menyesuaikan mekanisme kerja pasca penyetaraan jabatan, namun karena sampai saat ini belum ditetapkan aturan terkait mekanisme kerja sehingga belum bisa menyusun SOP, selanjutnya SOP dibawah Sekretaris disusun seragam untuk semua perangkat daerah diharapkan nantinya dapat menghasilkan keselarasan SOP bidang Sekretariat di Perangkat Daerah/Biro agar penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selain itu juga memberikan pemahaman penyusunan SOP khusus bagian-bagian di Perangkat Daerah untuk disesuaikan dengan penyetaraan jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- iii. Jumlah PD/ Biro yang mengikuti sosialisasi peta Proses Bisnis dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi peta proses bisnis, dan telah dihadiri oleh seluruh perangkat daerah/Biro dan UPT secara virtual.

Dari kegiatan tersebut diharapkan setiap perangkat daerah memahami dan mengetahui setiap tujuan yang harus dicapai sesuai dengan visi dan misi dari Gubernur Kalimantan Barat. Penyusunan peta proses bisnis ini juga menolong perangkat daerah untuk memetakan tugas dan fungsi yang dijalankan sesuai dengan misi yang ada. Perangkat daerah juga dapat melihat potensi masalah yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan memperhatikan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menghasilkan Peta Proses Bisnis dan dapat menjadi contoh setiap perangkat daerah untuk menghasilkan peta proses bisnis pemerintahan di setiap perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- iv. Jumlah Peraturan Gubernur bidang tatalaksana dengan realisasi sebesar 200% dengan capaian kinerja 2 Peraturan Gubernur. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dari pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan bidang ketatalaksanaan ini adalah Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan adalah 1 (satu) Peraturan Gubernur, dan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 105 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian capaian kinerja adalah 2 (dua) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- v. Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Dokumen. Pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan pada Tahun 2021 yang lalu dengan mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan beberapa kali pembahasan melalui rapat Tim dan dari hasil pembahasan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 809/OR/2021 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Sebagai tindak lanjut penyusunan peta proses bisnis Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah di tahun yang sama tahun 2021 dan dokumen peta proses bisnis perangkat daerah diserahkan ke Biro organisasi. Selanjutnya guna percepatan penyusunan peta proses bisnis di perangkat daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang telah disusun sebelumnya maka pada tanggal 5 April 2021 telah dilaksanakan penyusunan peta proses bisnis kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar secara virtual dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan asistensi penyusunan peta proses bisnis selama 2 (dua) hari pada tanggal 13 April s.d. 14 April 2021 yang dilaksanakan di ruang Saji Kantor Gubernur Kalbar. Sebagai bahan evaluasi, penyusunan peta proses bisnis tahun 2021 telah diminta untuk disusun dengan mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019, namun sampai saat ini masih menunggu Dokumen RPJMD yang telah disesuaikan dengan Permendagri tersebut dan masih dalam tahap penyempurnaan sehingga dokumen Renstra pada perangkat daerah juga menunggu penyempurnaan dokumen RPJMD sebagai dasar penyusunan Renstra.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019–2021 dan target Renstra 2021-2023

**TABEL 3.7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2019-2021 DAN TARGET RPJMD
SASARAN STRATEGIS 2**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah	Persentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori Baik	83,17%	81,33%					
	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase kebijakan ketatalaksanaan yang ditetapkan	100%	100%					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar			85,01	84	84,2	84,5	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 mencapai 83,17% dan 100%, pada tahun 2020 realisasinya mencapai 81,33% dan 100%. Sedangkan untuk tahun 2021 capaian Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar 85,01. Perkiraan untuk Target Tahun 2022 sampai tahun 2023 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2021 dikarenakan indikator kinerja diatas sudah diproyeksi akan tercapai sesuai dengan target.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar, belum semua perangkat daerah/UPT dapat dilakukan monitoring secara langsung berulang kali dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah personil. Disamping itu juga dengan adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan banyaknya perangkat daerah yang melakukan Work From Home serta himbuan untuk menjaga jarak demi mencegah penyebaran virus corona mengakibatkan tim monitoring dan evaluasi pelayanan publik harus menyusun jadwal ulang kepada perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terbatasnya anggaran dikarenakan adanya pengurangan dana dari yang sudah dianggarkan untuk kegiatan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan kurang maksimal.

Adapun permasalahan yang ditemui dari hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, belum semua Kabupaten/Kota dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan secara

langsung dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga adanya wabah Covid 19, selain itu kabupaten/kota juga meminta apabila diselenggarakan kegiatan sosialisasi/workshop/bimtek juga dapat mengundang perangkat daerah kabupaten/kota.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Barat dapat disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dinilai rendah oleh responden, dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan menengah serta melakukan upaya-upaya percepatan pelayanan seluruh jenis layanan di unit kerja.
- 3) Melakukan bimbingan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Bagian Organisasi beserta beberapa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan SKM pada triwulan ke-2 s.d. triwulan ke-4 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut.. Hal ini juga untuk melihat bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Biro/UPT terhadap hasil SKM setiap tahunnya.
- 4) Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan SKM dan Penyusunan Laporan SKM pada triwulan ke-3 setiap tahunnya untuk meningkatkan jumlah UPP yang menyampaikan laporan SKM maupun meningkatkan kualitas dari laporan SKM tersebut.
- 5) Meminta Kabupaten/Kota se-Kalbar agar seluruh UPP nya dapat melaksanakan dan menyampaikan laporan SKM.
- 6) Menyurati seluruh Perangkat Daerah/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar maupun kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar terkait pelaksanaan SKM dan penyampaian laporan SKM.
- 7) Untuk penyusunan Laporan SKM Provinsi Kalbar kedepannya dapat diubah waktu pelaksanaannya menjadi dilaksanakan mulai triwulan ke-3 dan diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan ke-4 tahun berjalan yang sama antara tahun pelaksanaan SKM dengan tahun penyusunan laporannya.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan Sub Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar yaitu dengan menyusun jadwal yang lebih baik dan terencana pada tahun yang akan datang.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan Sub Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu jika kedepannya kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan kembali sebaiknya dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan agar didalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan terhadap Kabupaten/Kota yang belum dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara virtual guna membahas hal-hal yang menjadi kendala Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan permintaan kelengkapan data

pendukung yang diperlukan dapat dikirim melalui email atau website Biro Organisasi.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TABEL 3.11
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	95%	95%
Capaian Kinerja Sasaran 4					

Realisasi capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 95% dengan capaian kinerja sebesar 95%.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.12
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(%)	%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Program Penataan Organisasi	381,011,200	381,011,200	100	95	-5%

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran pada program penataan organisasi sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 95%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar -5%.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya untuk mencapai Sasaran Strategis 3 tersebut di atas, melalui pelaksanaan Program Penataan Organisasi.

A. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

2. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai 3 output dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.
- b. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian output kinerja 5 Kabupaten/ Kota.
- c. Persentase Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian output kinerja 100%.

Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh dua subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:

- i. Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan.

Pelaksanaan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu bentuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut selanjutnya dilakukan penilaian mandiri melalui pengisian LKE PMPRB baik offline maupun online dengan melampirkan evidence (bukti dukung). LKE PMPRB tersebut akan dinilai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dan Tim Penilai dari Kementerian PAN dan RB.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya, serta untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui langkah – langkah konkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat persiapan Asistensi LKE PMPRB pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Inspektorat Provinsi

- Kalbar, serta rapat panitia kegiatan di lingkungan Biro Organisasi.
2. Melaksanakan Asistensi Penyusunan LKE PMPRB pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2021 yang dihadiri seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/0686/OR-C tanggal 24 Februari 2021;
- ii. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi / Internalisasi Road Map RB Pemprov Kalbar dengan realisasi sebesar 125% dengan capaian kinerja 100 Orang.
- Pelaksanaan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 merupakan salah satu bentuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi yang selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 melalui langkah – langkah konkrit sebagai berikut :
1. Melaksanakan rapat Finalisasi Revisi Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Kalbar sebagaimana Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 890/0984/OR-C tanggal 18 Maret 2021.
 2. Melaksanakan sosialisasi road map dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor 890/130/OR-C tanggal 29 Maret 2021 Hal Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi.
 3. Melaksanakan asistensi penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi yang selaras dengan road map reformasi birokrasi Pemprov Kalbar sebagaimana surat Sekretaris Daerah Nomor 890/1117/OR-C tanggal 26 Maret 2021 Hal Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari sosialisasi road map reformasi birokrasi.
- iii. Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 10 Perangkat Daerah/ Biro. Biro Organisasi Setda Prov Kalbar telah melaksanakan pembinaan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2019 – 2023. Adapun langkah – langkah konkrit yang telah dilakukan terkait pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksud antara lain :

1. Rapat Persiapan Asistensi LKE PMPRB Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi yang dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kalimantan Barat
2. Asistensi penyusunan LKE PMPRB Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Organisasi, dan Ruang Perpustakaan Setda Prov. Kalimantan Barat yang di pimpin oleh Asistensi Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar.
3. Permintaan data rencana aksi reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah.
4. Membuat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Memfasilitasi Perangkat Daerah untuk mengikuti Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 juni 2021 di ruangan Audio Visual Kantor Gubernur. melalui Surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/10/RB.01/2021 tanggal 7 juni 2021 Hal Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Sosialisasi dimaksud difasilitasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 890/1912/OR-C Tanggal 9 Juni 2021 Hal Undangan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.
6. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam mengikuti Simulasi Paparan RB dan SAKIP berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Tanggal 23 Agustus 2021 Nomor B/131/AA.04/2021 hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.
7. Internalisasi implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, serta asistensi pengisian PMPRB Online dalam rangka evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/3038/ OR-C tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.
8. Tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi pada tanggal 1 September 2021 untuk melakukan mengecek kembali kelengkapan evidence implementesai Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan.
9. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam memperbaiki evidence pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai tindak lanjut hasil rapat evaluasi reformasi birokrasi bersama Sekretaris Daerah pada tanggal 1 September 2021. Fasilitas dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kalbar dalam memverifikasi

- data evidence pelaksanaan RB Perangkat Daerah yang disampaikan ke Inspektorat dan Biro Organisasi.
- iv. Jumlah kab/kota yang di bina dengan realisasi sebesar 140% dengan capaian kinerja 7 Kabupaten/ Kota.

Sehubungan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada kegiatan pembinaan penerapan reformasi birokrasi Kab/Kota maka tidak ada dilaksanakan monitoring dan evaluasi tahun 2021. Namun demikian langkah – langkah pembinaan lainnya diupayakan terus dilaksanakan baik melalui Zoom Meeting maupun inventarisasi data pelaksanaan RB. Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan terkait pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kabupaten/Kota antara lain :

1. Rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar melalui media Zoom Meeting, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 0890/1353/OR-C Hal Pertemuan Dalam Rangka Pembinaan Kabupaten/Kota Terhadap Penataan Organisasi. Dalam rapat tersebut hal – hal yang dibahas antara lain :
 - a) Penataan organisasi terkait penyederhanaan organisasi yang merupakan quick wins mandatory dalam reformasi birokrasi;
 - b) Penyusunan Proses Bisnis, yang juga menjadi poin penting dalam percepatan reformasi birokrasi;
 - c) Inovasi pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta inovasi – inovasi pelayanan publik pada Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan. Hal ini juga ditunjang dengan SOP dan Standar Pelayanan yang baik dan terus direviu sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d) Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota sedang dalam penyusunan, yang selaras dengan Road Map Nasional 2020 – 2024 dan RPJMD Kabupaten/Kota.
 - e) PMPRB Online pada Kabupaten/Kota tahun 2021. Sebagai catatan, pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Bengkayang tidak mendapat nilai LHE RB. Pada rapat dimaksud sudah dikonfirmasi bahwa seluruh Kabupaten/Kota melakukan register akun PMPRB Online dan melakukan penyusunan LKE PMPRB Online. Berkenaan dengan hal tersebut tahun 2020 diharapkan seluruh Kabupaten/Kota mendapat nilai LHE Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB.
 2. Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 050/6848/DIKBUD-A diminta Permohonan Menjadi Narasumber yang menangani Reformasi Birokrasi.
- 2) Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:
- i. Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan.
 - ii. Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Pergub pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Pemprov Kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47

Perangkat Daerah/ Biro dan 14 Kabupaten/ Kota. Output dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan. Kegiatan Sosialisasi terus menerus dilaksanakan tidak hanya pada saat acara seremonial tetapi juga dilakukan melalui media sosial dan pelaksanaan pekerjaan sehari - hari.

- iii. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan dan teknis dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 120 Orang.
- iv. Jumlah Laporan Penyusunan Rumusan Nilai- Nilai Budaya Kerja Perangkat Daerah Prov. Kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan. Output dari kegiatan Penyusunan Rumusan Nilai- Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya juga adalah dokumen pakta integritas antara seluruh Perangkat Daerah dengan Bank Sampah.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2021 dan Target Akhir Jangka Menengah 2021

TABEL 3.13
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2019-2021 DAN TARGET 2021
SASARAN STRATEGIS 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	
3.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi	Jumlah perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan eformasi Birokrasi	-	47 PD					
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas			95%	100%	100%	100%	

Pada tahun 2021, target Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas sebanyak 100% dengan capaian sebanyak 95%. Perkiraan untuk Target Tahun 2022 sampai tahun 2023 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2021 dikarenakan indikator kinerja diatas sudah diproyeksi akan tercapai sesuai dengan target.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan RB ke seluruh Perangkat Daerah;
2. LKE PMPRB 2021 merupakan format terbaru yang terdapat perubahan beberapa indikator pada 8 (delapan) area perubahan yang harus dipenuhi, serta adanya penambahan fitur pada aplikasi PMPRB Online, sehingga perlu waktu penyesuaian bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengisian PMPRB Online;
3. Kendala jaringan dan sistem PMPRB Online yang tidak stabil saat melakukan pengisian PMPRB Online, sehingga mengakibatkan beberapa data yang telah diinput tidak tersimpan di sistem.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024, antara lain :

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan Sosialisasi / Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024;

2. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui sebagaimana yang diamanatkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020. Pertama, Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Sehingga perlu waktu yang lebih optimal dalam pembinaan dan penyesuaian penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

- 1) Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan RB ke seluruh Perangkat Daerah;
- 2) LKE PMPRB 2021 merupakan format terbaru yang terdapat perubahan beberapa indikator pada 8 (delapan) area perubahan yang harus dipenuhi, serta adanya penambahan fitur pada aplikasi PMPRB Online, sehingga perlu waktu penyesuaian bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengisian PMPRB Online;
- 3) Kendala jaringan dan sistem PMPRB Online yang tidak stabil saat melakukan pengisian PMPRB Online, sehingga mengakibatkan beberapa data yang telah diinput tidak tersimpan di sistem.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, perlu memperhatikan dan mengambil langkah – langkah

perbaikan berdasarkan rekomendasi perbaikan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2021. Selain itu, pembinaan, internalisasi dan money RB pada Perangkat Daerah juga perlu dilakukan secara intensif.

Upaya penerapan dan implementasi pelaksanaan nilai-nilai budaya kerja dilakukan secara bertahap dan kontinyu. Hal ini disebabkan karena implikasi penerapan nilai-nilai budaya kerja adalah pada terciptanya perubahan mind-set dan cultural-set Aparatur Sipil Negara. Setiap perilaku ASN harus mempedomani dari nilai-nilai budaya kerja yang telah tertuang di dalam peraturan. Masing-masing nilai kemudian dijabarkan dan dipetakan untuk dapat secara aktual dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga diperlukan kegiatan penyusunan rumusan nilai-nilai budaya kerja. Pada tahun ini, kegiatan penyusunan rumusan terkonsentrasi pada nilai Integritas, point bersih diri dan bersih lingkungan, yang kemudian diwujudkan dengan kerjasama antara perangkat daerah dengan Bank Sampah. Kegiatan ini selain untuk membentuk perubahan perilaku ASN juga mendukung green environment demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Sejalan dengan implementasi nilai-nilai budaya kerja perlu dilakukan kegiatan penyusunan rumusan nilai-nilai budaya kerja lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, menjawab tantangan dan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara optimal.

Sebagai bagian penting dari perubahan mind-set dan cultural-set, budaya kerja semestinya dapat lebih dimaknai secara mendalam oleh seluruh aparatur sipil negara sehingga upaya reformasi birokrasi dapat lebih optimal. Di masa mendatang, kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pengembangan budaya kerja yang positif tidak hanya terbatas pada adanya Peraturan Gubernur tapi lebih kepada upaya meningkatkan kualitas serta kuantitas budaya kerja yang berimplikasi langsung pada meningkatnya kualitas aparatur sipil negara di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

TABEL 3.14
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11,5	N/A	N/A
Capaian Kinerja Sasaran 4					

Realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Tahun 2021 ditargetkan sebesar 11,5 dan realisasinya n/a (menunggu ketetapan dari KemenPAN-RB. Sehingga capaian kinerja belum bisa diketahui.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**TABEL 3.15
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(%)	
4.	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Program Penataan Organisasi	201.121.150	199.620.850	99,25	N/A	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,25% dan realisasi capaian kinerja sasaran belum diketahui, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya juga belum bisa diketahui.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan ini mempunyai output Persentase laporan kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu dengan realisasi sebesar 0%. Output kinerja kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ditunjang oleh subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja memiliki beberapa output kinerja sebagai berikut:

i. Jumlah LKJ pemprov kalbar yang disusun tepat waktu dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Dokumen.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2018, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pemerintah Provinsi dalam hal Penyusunan Perjanjian kinerja Tahun 2019 : eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan pada Tahun 2020 perjanjian kinerja juga telah disusun sampai pada level staf / pelaksana;
2. Pemerintah Provinsi telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi antar aspek perencanaan (Simdalrenbang), penganggaran (Simakda) dan Simonev. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi mengupgrade sistem aplikasi e-kinerja. Sebuah aplikasi yang juga terintegrasi dengan Simdalrenbang dan simakda, yang digunakan untuk

- mengukur kinerja capaian program secara triwulanan dan capaian kinerja utama suatu Perangkat Daerah;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun 2020 telah dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar;
 4. Penyusunan Proses bisnis Perangkat Daerah berdasarkan Permenpan Nomor 19 Tahun 2018.
- ii. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemprov yang disusun dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Laporan.
 - iii. Jumlah Perangkat Daerah Yang Di evaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.
 - iv. jumlah dokumen perjankin pemprov kalbar dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 1 Dokumen. Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar yang ditetapkan dengan target 1 Dokumen dan capaian indikator tersebut sebesar 1 dokumen
 - v. jumlah perangkat daerah yang diasistensi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.
Indikator hasil dari kegiatan asistensi ini yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik dengan target 38 Perangkat Daerah dan Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja dengan baik dengan target 38 Perangkat Daerah.
 - vi. jumlah perangkat daerah yang di monitoring dan evaluasi dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.
 - vii. jumlah kabupaten/ kota yang di bina dengan realisasi sebesar 40% dengan capaian kinerja 2 Kabupaten/ Kota.
 - viii. jumlah perangkat daerah yang mengikuti workshop saki dengan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 47 Perangkat Daerah/ Biro.
Indikator hasil dari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (*Workshop* SAKIP) ini yaitu Perangkat Daerah dan Biro yang menindaklanjuti hasil *Workshop* SAKIP dengan target 47 Perangkat Daerah dan capaian indikator tersebut sebesar 47 Perangkat Daerah.

1. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2021 dan Target Akhir Jangka Menengah 2021

**TABEL 3.16
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2019-2021 DAN TARGET 2021
SASARAN STRATEGIS 4**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RENSTRA			Tingkat Kemajuan
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	
4.	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP nilai pelaporan kinerja	10,52	11					
	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja			N/A	11,5	12	12,5	

Pada Tahun 2019, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebesar 10,52. Pada tahun 2020, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja terealisasi sebesar 11. Pada tahun 2021, Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja belum diketahui dikarenakan masih menunggu ketetapan dari KemenPanRB. Perkiraan untuk Target Tahun 2022 sampai tahun 2023 akan terealisasi sesuai dengan tahun 2021. Namun ini masih bisa berubah apabila ada perubahan cara penghitungan nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kementerian PAN dan RB RI.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Laporan Kinerja tersebut di revisi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dan hingga saat ini masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum mengembalikan hasil dari revisi Laporan Kinerja tersebut.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan pada masing-masing Perangkat Daerah yaitu diantaranya:

- a. Indikator Kinerja yang terdapat di Perjanjian Kinerja masih ada yang belum sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Dengan adanya Penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka mengakibatkan terjadinya perubahan Indikator Kinerja serta Program maupun Kegiatan pada Perangkat Daerah.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sebagai usaha untuk perbaikan, telah dilakukan penyusunan cascading kinerja sebagai dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki SAKIP di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
- b) Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai;
- c) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU pada butir 1 diatas. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
- d) Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi;
- e) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;
- f) Meningkatkan pemahaman dan ketertiban pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi;
- g) Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dan organisasi sebagai ukuran pemberian *Reward and Punishment*.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasi anggaran dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp.2.122.415.830,00. Anggaran ini merupakan angka setelah adanya perubahan anggaran yang terdiri atas anggaran program rutin/penunjang sebesar Rp.625.053.494,- dan anggaran program prioritas sebesar Rp.1.497.362.336,- sebagaimana yang terdapat dalam tabel yaitu:

**TABEL 3.17
ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM PRIORITAS**

NO	PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.497.362.336,00	1.495.655.850,00	99,89
	JUMLAH	1.497.362.336,00	1.495.655.850,00	99,89

BAB IV PENUTUP

Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021, khususnya untuk 4 (empat) Sasaran, 2 (dua) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja mencapai **99,89%**.

Tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sebesar 100%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (100%)*.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar sebesar 101,20%, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (101,45%)*.
3. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota sebesar N/A, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (95%)*.
4. Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar sebesar N/A, yaitu pada *Program Penataan Organisasi (N/A)*.

Secara umum, capaian kinerja yang dicapai tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 99,89%.
- b. Capaian kinerja untuk 1 (satu) program pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 99,89%.
- c. Capaian kinerja untuk 8 (delapan) kegiatan pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikategorikan berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 99,89%.

Walaupun pencapaian kinerja dikatakan berhasil, namun masih ada beberapa hambatan didalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan di atas, antara lain:

- a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
- b. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- c. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam melaksanakan pembinaan RB ke seluruh Perangkat Daerah.
- d. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menggambarkan analisis pencapaian kerjanya. Laporan kinerja juga belum mampu menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- e. Penetapan program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan menyebabkan tidak efisiensi dan efektif.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.

- d. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
- e. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.



Pontianak, 31 Januari 2022
KEPALA BIRO ORGANISASI

RITA HASTARITA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791208 200003 2 002

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar
 Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	100%	100%	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	84,00	85,51	101,2
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	100%	95%	95
4	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	11,5	N/A	N/A

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 1.497.362.336,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 1.495.655.850,00



Pontianak, 30 Januari 2022
 Kepala Biro Organisasi,

RITA HASTARITA, S.Sos. M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19791208 200003 2 002